



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RINA AMBARWATI, S.E**

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **SRI PURWANTI, S.E**

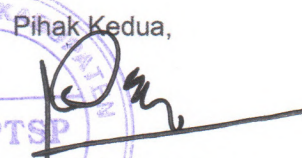
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

SRI PURWANTI, S.E
NIP. 196807181993032007

Pihak Pertama,

RINA AMBARWATI, S.E
NIP. 198112302006042010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**Kasubbag Umum dan Kepegawaian****Pada****Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga**

No.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Tersusunnya laporan barang milik daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan barang milik daerah yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100
	- Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	- Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	12
2	Meningkatnya kapasitas ASN	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	Persen	100
	- Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	- Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	4
3	Terpenuhinya layanan administrasi umum	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	Persen	100
	- Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12
	- Tersedianya bahan logistik kantor	- Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12
	- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dokumen	12
	- Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	- Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12
	- Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	- Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12
	- Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	- Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dokumen	12
4	Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Persen	100
	- Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	- Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	2
5	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	Persen	100
	- Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	- Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12
	- Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	- Jumlah laporan penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	Laporan	12
	- Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	- Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12
	- Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	- Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12

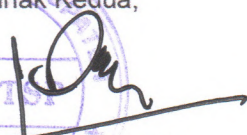
6	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100
	- Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	- Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara (ganti oli, ganti suku cadang, dan lainnya) dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	17
	- Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	- Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	12
	- Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	- Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	4.800.000,-	APBD
	- Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4.800.000,-	
2	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	4.000.000,-	APBD
	- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	4.000.000,-	
3	Administrasi umum perangkat daerah	69.332.000,-	APBD
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.022.000,-	
	- Penyediaan bahan logistik kantor	47.958.000,-	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.152.000,-	
	- Fasilitasi kunjungan tamu	5.000.000,-	
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	9.600.000,-	
	- Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	3.600.000,-	
4	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	50.381.000,-	APBD
	- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	50.381.000,-	
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	671.795.000,-	APBD
	- Penyediaan jasa surat menyurat	360.000,-	
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	201.435.000,-	
	- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3.600.000,-	
	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	466.400.000,-	

6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	164.570.000,-	APBD
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	128.952.000,-	
	- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	10.618.000,-	
	- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	25.000.000,-	
Jumlah		964.878.000,-	

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,



SRI PURWANTI, S.E
NIP. 196807181993032007



Pihak Pertama,



RINA AMBARWATI, S.E
NIP. 198112302006042010



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RINA AMBARWATI, S.E**

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **SRI PURWANTI, S.E**

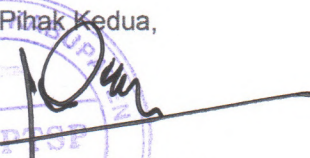
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

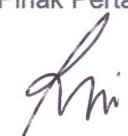
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 9 Februari 2026

Pihak Kedua,

SRI PURWANTI, S.E
NIP. 196807181993032007

Pihak Pertama,

RINA AMBARWATI, S.E
NIP. 198112302006042010

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

No.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Tersusunnya laporan barang milik daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan barang milik daerah yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100
	- Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	- Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	12
2	Meningkatnya kapasitas ASN	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	Persen	100
	- Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	- Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	4
3	Terpenuhinya layanan administrasi umum	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	Persen	100
	- Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12
	- Tersedianya bahan logistik kantor	- Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12
	- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dokumen	12
	- Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	- Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12
	- Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	- Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12
	- Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	- Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dokumen	12
4	Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	Persen	100
	- Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	- Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	2
5	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	Persen	100
	- Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	- Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12
	- Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	- Jumlah laporan penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	Laporan	12
	- Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	- Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12
	- Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	- Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12

6	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100
	- Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	- Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara (ganti oli, ganti suku cadang, dan lainnya) dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	17
	- Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	- Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	12
	- Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	- Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12
7	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja yang tersusun tepat waktu	Persen	100
	- Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2
	- Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	- Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	5
8	Tersusunnya laporan administrasi keuangan tepat waktu	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	Persen	100
	- Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	- Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	20
	- Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	- Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12
	- Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	- Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Dokumen	12

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	4.800.000,-	APBD
	- Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4.800.000,-	
2	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	4.000.000,-	APBD
	- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	4.000.000,-	
3	Administrasi umum perangkat daerah	69.332.000,-	APBD
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.022.000,-	
	- Penyediaan bahan logistik kantor	47.958.000,-	
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.152.000,-	
	- Fasilitasi kunjungan tamu	5.000.000,-	
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	9.600.000,-	
	- Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	3.600.000,-	
4	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	50.381.000,-	APBD
	- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	50.381.000,-	

5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	671.795.000,-	APBD
	- Penyediaan jasa surat menyurat	360.000,-	
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	201.435.000,-	
	- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3.600.000,-	
	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	466.400.000,-	
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	164.570.000,-	APBD
	- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	128.952.000,-	
	- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	10.618.000,-	
	- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	25.000.000,-	
7	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	976.000,-	APBD
	- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	400.000,-	
	- Evaluasi kinerja perangkat daerah	576.000,-	
8	Administrasi keuangan perangkat daerah	3.124.616.000,-	APBD
	- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.040.597.000,-	
	- Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	51.339.000,-	
	- Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	32.680.000,-	
	Jumlah	4.090.470.000,-	

Purbalingga, 9 Februari 2026

Pihak Kedua,



SRI PURWANTI, S.E
NIP. 196407181993032007



Pihak Pertama,



RINA AMBARWATI, S.E
NIP. 198112302006042010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **KARIM AMRULLAH, S.E**

Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **JOHAN ARIFIN, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 12 Januari 2026



Pihak Kedua,

JOHAN ARIFIN, S.Sos, M.Si
NIP. 197405201998031004

Pihak Pertama,

KARIM AMRULLAH, S.E
NIP. 197509211997031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
Pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

No.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya fasilitasi kemitraan	Persentase LOI	Persen	28,57
	- Ditetapkannya kebijakan daerah dalam pemberian fasilitasi/insentif dan kemudahan penanaman modal	- Jumlah keputusan Bupati dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Dokumen	1
	- Terlaksananya kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	- Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	2
2	Terlaksananya pembuatan peta potensi investasi	Jumlah bidang usaha terpetakan menurut potensi	Bidang usaha	1
	- Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota	- Jumlah rancangan rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota	Dokumen	1

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Penetapan pemberian fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	11.000.000,-	APBD
	- Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitasi/insentif dan kemudahan penanaman modal	7.000.000,-	
	- Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota	4.000.000,-	
2	Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota	57.000.000,-	APBD
	- Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota	57.000.000,-	
	Jumlah	68.000.000,-	

Purbalingga, 12 Januari 2026



Pihak Kedua,

JOHAN ARIFIN, S.Sos, M.Si
NIP. 197405201998031004

Pihak Pertama,

KARIM AMRULLAH, S.E
NIP. 197509211997031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANTONIUS TONY EKARISTİYANTO, S.S**

Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **JOHAN ARIFIN, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

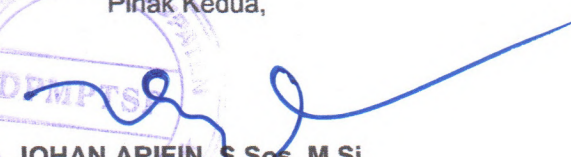
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

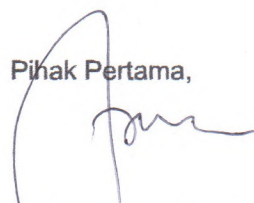
Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,



JOHAN ARIFIN, S.Sos, M.Si
NIP. 197405201998031004

Pihak Pertama,



ANTONIUS TONY EKARISTİYANTO, S.S
NIP. 198707052010011006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
Pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

No.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya pembuatan peta potensi investasi	Jumlah bidang usaha terpetakan menurut potensi	Bidang usaha	1
	- Tersusunnya peta potensi investasi kabupaten/kota	- Jumlah dokumen peta potensi investasi kabupaten/kota	Dokumen	1
2	Meningkatnya promosi penanaman modal	Jumlah perusahaan yang mengikuti promosi penanaman modal	Perusahaan	5
	- Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	- Jumlah kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	Kegiatan	4
	- Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	- Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal kabupaten/kota	Dokumen	1

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota	12.480.000,-	APBD
	- Penyusunan peta potensi investasi kabupaten/kota	12.480.000,-	
2	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	76.236.000,-	APBD
	- Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	69.236.000,-	
	- Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan kabupaten/kota	7.000.000,-	
	Jumlah	88.716.000,-	

Purbalingga, 12 Januari 2026



Pihak Kedua,

JOHAN ARIFIN, S.Sos, M.Si
NIP. 197405201998031004

Pihak Pertama,

ANTONIUS TONY EKARISTIYANTO, S.S
NIP. 198707052010011006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WIDJI TRI SUSETIYO, S.Sos**

Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **JOHAN ARIFIN, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 12 Januari 2026



Pihak Kedua,

JOHAN ARIFIN, S.Sos, M.Si
NIP. 197405201998031004

Pihak Pertama,

WIDJI TRI SUSETIYO, S.Sos
NIP. 197205091992031004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
Pada

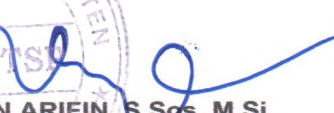
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

No.	Rencana Kinerja Operasional	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya fasilitasi (penyelesaian permasalahan/hambatan, bimtek, pengawasan) kepada pelaku usaha dalam merealisasikan usaha	Persentase penyelesaian permasalahan/hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan usaha	Persen	100
	- Terlaksananya bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko	- Jumlah bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kegiatan	3
	- Terlaksananya penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	- Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Pelaku usaha	24
	- Terlaksananya analisis dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku inspeksi lapangan terhadap kegiatan serta evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha para pelaku usaha	- Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan di verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Kegiatan usaha	42

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	120.292.000,-	APBD
	- Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	60.000.000,-	
	- Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	30.292.000,-	
	- Pengawasan penanaman modal	30.000.000,-	
	Jumlah	120.292.000,-	

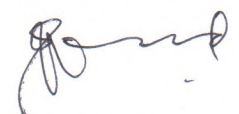
Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,



JOHAN ARIFIN, S.Sos, M.Si
NIP. 197405201998031004

Pihak Pertama,



WIDJI TRI SUSEPTIYO, S.Sos
NIP. 197205091992031004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. ALLIF SUBIYANTO, S.Ag**

Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda/Subkoor Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **JOHAN ARIFIN, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

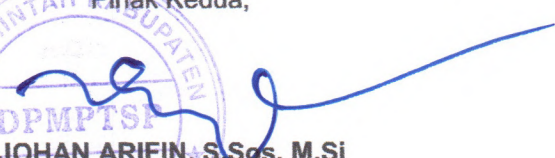
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

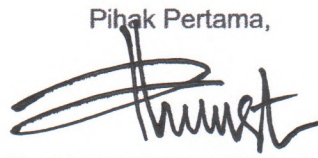
Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,



JOHAN ARIFIN, S.Sos, M.Si
NIP. 197405201998031004

Pihak Pertama,



M. ALLIF SUBIYANTO, S.Ag
NIP. 197101212009011005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Penata Perizinan Ahli Muda

Pada

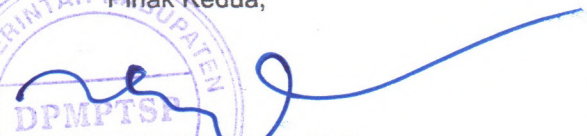
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

No.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pelayanan penerbitan izin usaha	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin	Persen	99
	- Tersedianya pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	- Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan usaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Pelaku usaha	12.116
2	Terlaksananya pengelolaan sistem informasi	Persentase sistem informasi yang terkelola	Persen	100
	- Tersedianya data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	- Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Dokumen	16.264

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	82.392.000,-	APBD
	- Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	82.392.000,-	
2	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten / kota	12.920.000,-	APBD
	- Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	12.920.000,-	
	Jumlah	95.312.000,-	

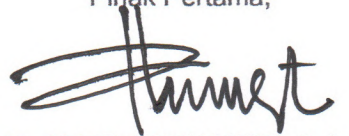
Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,



JOHAN ARIFIN, S.Sos, M.Si
NIP. 197405201998031004

Pihak Pertama,



M. ALLIF SUBIYANTO, S.Ag
NIP. 197101212009011005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERLINA PUSPONEGORO, S.Sos**

Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **JOHAN ARIFIN, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,


JOHAN ARIFIN, S.Sos, M.Si
NIP. 197405201998031004

Pihak Pertama,



HERLINA PUSPONEGORO, S.Sos
NIP. 198206102010012024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Penata Perizinan Ahli Muda

Pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

No.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pelayanan penerbitan izin usaha	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin	Persen	99
	- Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	- Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Kegiatan usaha	13

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	10.872.000,-	APBD
	- Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	10.872.000,-	
	Jumlah	10.872.000,-	

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

HERLINA PUSPONEGORO, S.Sos
NIP. 198206102010012024